

**PERAN BAPEL JPS DALAM PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN
LANSIA DI DESA PANGGUNGHARJO: ANALISIS DENGAN
KERANGKA OECD WELL-BEING**



**OLEH
LUQMAN FAIS MAULANA
NIM: 22200011053**

TESIS

**PROGRAM STUDI INTERDISCIPLINARY ISLAMIC STUDIES
KONSENTRASI PEKERJAAN SOSIAL
PASCASARJANA
UIN SUNAN KALIJAGA**

YOGYAKARTA

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luqman Fais Maulana
NIM : 22200011053
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 8 Agustus 2026



METERAI
TEMPEL
235AOX188759544

Luqman Fais Maulana

22200011053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luqman Fais Maulana

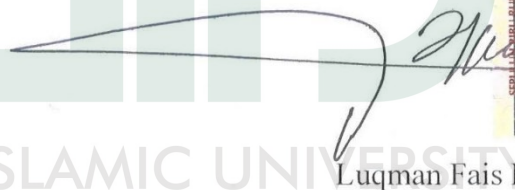
NIM : 22200011053

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi. Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Agustus 2026



Luqman Fais Maulana

22200011053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1166/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : Peran Bapel JPS dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Lansia di Desa Panggungharjo:
Analisis dengan Kerangka OECD Well-Being

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUQMAN FAIS MAULANA, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 22200011053
Telah diujikan pada : Rabu, 26 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ita Rodiah, SS., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6a900e2469436



Penguji II

Prof. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos.,

M.Si.

SIGNED

Valid ID: 6a8fda22890a2



Penguji III

Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW., Ph.D.

SIGNED

Valid ID: 6a900bd27c051



Yogyakarta, 26 Agustus 2026

UIN Sunan Kalijaga

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 6a90d3c377844

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memberikan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Luqman Fais Maulana

NIM : 22200011053

Judul Tesis : Peran Bapel JPS Dalam Perlindungan Dan Kesejahteraan Lansia

Di Desa Panggungharjo: Analisis Dengan Kerangka OECD Well-Being

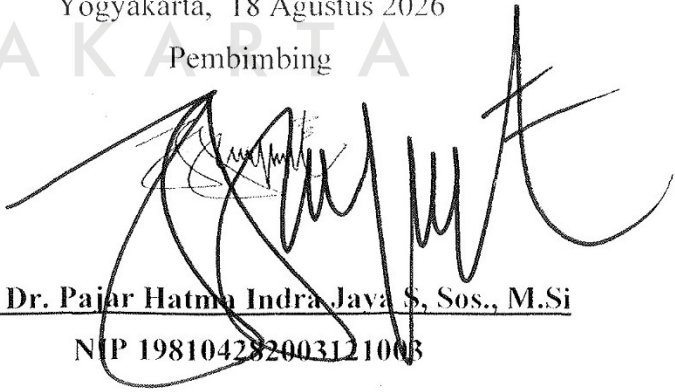
Sudah dapat diajukan kepada Prodi Interdisciplinary Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata dua dalam konsentrasi Pekerjaan Sosial.

Dengan ini kami harap agar Tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 18 Agustus 2026

Pembimbing


Prof. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya S, Sos., M.Si

NIP 198104282003121003

ABSTRAK

Perlindungan sosial bagi lanjut usia merupakan bagian penting dari upaya memastikan kelompok rentan memperoleh akses terhadap pelayanan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan. Di Desa Panggungharjo, Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS) hadir sebagai institusi lokal yang memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi warga rentan, termasuk lansia. Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi Bapel JPS dalam perlindungan sosial bagi lansia, kontribusinya terhadap kesejahteraan lansia berdasarkan kerangka OECD Well-Being, serta tantangan kelembagaan yang dihadapinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan dengan triangulasi data. Kerangka *OECD Well-Being* digunakan untuk menganalisis kontribusi Bapel JPS terhadap berbagai dimensi kesejahteraan lansia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapel JPS menjalankan fungsi perlindungan sosial melalui tiga peran utama, yaitu sebagai pelayan publik di tingkat lokal, sebagai mekanisme koreksi terhadap keterbatasan program pemerintah, dan sebagai jaring pengaman terakhir bagi warga rentan. Fungsi tersebut diwujudkan melalui pendataan warga rentan, mobilisasi sumber daya, fasilitasi akses pelayanan kesehatan dan bantuan ekonomi, serta pelayanan langsung kepada warga yang mengalami keterbatasan akses. Ditinjau dari kerangka OECD Well-Being, Bapel JPS berkontribusi terhadap kesejahteraan lansia terutama melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, kondisi material, koneksi sosial, dan keterlibatan dalam kehidupan masyarakat. Namun, keberlanjutan Bapel JPS menghadapi tantangan berupa lambatnya regenerasi sumber daya manusia, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan kemandekan inovasi program. Penelitian ini menunjukkan bahwa institusi lokal dapat berperan sebagai mediator antara sistem perlindungan sosial formal dan kebutuhan spesifik warga rentan. Bapel JPS tidak hanya berfungsi sebagai penyalur bantuan, tetapi juga sebagai mekanisme lokal untuk mengidentifikasi, menghubungkan, dan memfasilitasi akses warga rentan terhadap sumber daya perlindungan sosial.

Kata kunci: Bapel JPS; Perlindungan Sosial; Kesejahteraan Lansia; Institusi Lokal; OECD Well-Being.

ABSTRACT

Ensuring vulnerable populations have access to the essential resources and services they need to thrive lies at the very heart of elderly social protection. In Panggungharjo Village, this vital mission comes to life through a unique community institution known as the Social Safety Net Executive Board (*Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial* or Bapel JPS). Operating directly on the front lines, Bapel JPS works to safeguard senior citizens, elevate their quality of life, and bridge the gaps in the local welfare ecosystem. This study investigates the operational functions of Bapel JPS, evaluates its impact on elderly well-being through the lens of the OECD Well-Being Framework, and examines the institutional bottlenecks threatening its long-term future.

To capture the full depth of Bapel JPS's local impact, the study adopted a rigorous qualitative research design. Data was gathered through immersive field observations, in-depth interviews, and thorough document reviews. The information was then synthesized using data reduction, structured visualization, and rigorous data triangulation. By pairing these methods with the multi-dimensional OECD Well-Being Framework, the research systematically maps how Bapel JPS influences the daily lives of the village's elderly residents.

The findings reveal that Bapel JPS operates as a vital three-pronged lifeline for the community. It serves simultaneously as a grassroots public service provider, a corrective bridge that fills the gaps left by national government welfare programs, and a final safety net for the most vulnerable. Bapel JPS realizes this mission by actively mapping at-risk seniors, mobilizing local resources, facilitating access to medical care and financial relief, and delivering direct assistance directly to the doorsteps of isolated or homebound individuals. When viewed through the OECD framework, Bapel JPS fundamentally transforms elderly well-being by improving material stability, enhancing healthcare access, strengthening social ties, and fostering active civic participation.

Ultimately, Bapel JPS demonstrates that local grassroots bodies are far more than mere distributors of aid. They serve as essential, empathetic bridges between rigid state welfare machinery and the nuanced, real-world needs of vulnerable citizens. However, its long-term sustainability hangs in the balance. Bapel JPS currently faces steep institutional hurdles, including a slow turnover in human resource regeneration, limited operational capacity, and a plateau in program innovation—challenges that must be met to ensure this vital community safety net continues to endure.

Keywords: Bapel JPS; Social Protection; Elderly Well-Being; Local Institutions; OECD Well-Being.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah tsummalhamdulillah 'ala kulli ni'mah, segenap puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menjadi makhluk yang berakhlak dan beradab dalam rangka mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alamin*.

Berkat pertolongan, welas asih, dan kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada penulis serta dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil akhirnya penulisan Tesis ini dapat terselesaikan. Penulisan Tesis yang diberi judul *“Peran Bapel JPS Dalam Perlindungan Dan Kesejahteraan Lansia Di Desa Panggunharjo: Analisis Dengan Kerangka OECD Well-Being”* disusun oleh penulis untuk menunaikan kewajiban pada tugas akhir dan melengkapi syarat-syarat dalam memperoleh gelar *Master of Art* (MA).

Dengan kesadaran diri dan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung, memotivasi, dan membantu penulis dalam kelancaran penulisan tesis. Untuk itu, rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan bagi penulis dalam mengikuti pendidikan hingga menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Najib Khailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D. selaku ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies dan jajarannya atas kebijaksanaan mereka dalam memudahkan urusan terkait penulisan.
4. Prof. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya S, Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tesis, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahnya sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh dosen dan staf Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya pada dosen yang pernah mengampu mata kuliah di kelas Konsetrasi Pekerjaan Sosial. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
6. Kedua orang tua tercinta, keluarga besar, keluarga kecil, mbak umi mbak ida mbak mif dek hani serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral, dan semangat yang tidak pernah putus kepada penulis dalam setiap proses kehidupan maupun penyelesaian studi.
7. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak Dr. H. Abdur Rouf, S.Ag., M.S.I dan Segenap jajarannya, Pak kasubbag, Pak Kasi Bimas Islam dan semua rekan Kementerian Agama Kabupaten Demak.
8. Rekan Kantor Urusan Agama Mranggen, Pak H. Nur Ali, Pak Taufiq, Mas Shodiq, Mba Milla, Bu Anis , Pak Basid, Bu Zubaidah, Mas Faiz, Pak Jari, Pak Wahab, Pak Umar, Pak Mul, Bu Muarofah.

9. Teman-Teman Pekerjaan Sosial 2022: Dr. Arif Wafidhi, Husein Maulana, Khofifah Hany Amaria, Yulita Jumada Barqah, Bu Nursari Sugiastuti, Dian Pertiwi, Nining Ayu Pratiwi.
10. Teman- teman Penghulu se-Kabupaten Demak dan APRI Demak, APRI Jateng dan seluruh Penghulu di Indonesia.
11. Teman-teman Komplek IJ Al-Masyhuriyyah PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, Ihsan Anwar dan teman-teman Gd. konveks.
12. Semua pihak yang mendukung penulis sepenuh hati.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan yang dimiliki penulis menjadikan tesis ini masih memiliki berbagai kekurangan yang memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi pengembangan penelitian dan penyempurnaan karya ilmiah ini pada masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan keilmuan **Interdisciplinary Islamic Studies**, khususnya Konsentrasi Pekerjaan Sosial, maupun bagi pengembangan kajian pekerjaan sosial pada umumnya, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap perlindungan hak-hak Lansia dan terwujudnya keadilan sosial di Indonesia. Semoga setiap ikhtiar kecil dalam karya ini bernilai ibadah di hadapan Allah Swt. Aamiin.

Yogyakarta, 18 Agustus 2026

Luqman Fais Maulana

MOTTO

"Usahakan Doamu dan Doakan Usahamu".

(Luqman Fais Maulana 2026)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan karya Tesis ini kepada:

Allah SWT

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang tanpa kasih sayang dan
pertolongan-Nya,
tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini.

Bapak dan Ibu

Kyai. Munawar (Alm) dan Ibu Nyai Jumirah (Almh)
Abah KH. Ahmad Shidqi Masyhuri dan Ibu Nyai Eni Kartikasari
Nyai Hj. Umi Salamah

.....Allāhummarhamhumā kamā rabbayānī sagīrā.....

Terimakasih tak terhingga senantiasa ananda ucapkan kepada para wali maupun
guru-guru yang tak henti-hentinya mendoakan ananda menjadi anak yang saleh
dan berbakti kepada bangsa dan negara.

Kakak-kakak

Adik

Teman-Teman

Komplek IJ Al-Masyhuriyyah

Terimakasih telah memberikan semangat

Almamater Peksos 2022

....dimanapun kalian berada....

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II GAMBARAN BAPEL JPS DAN DESA PANGGUNGHARJO.....	31
A. Gambaran Umum Desa Panggungharjo	31
B. Gambaran Umum Bapel JPS Desa Panggungharjo	40
1. Program BAPEL JPS	40
2. Sejarah Singkat Program BAPEL JPS	42
3. Pembagian Peserta BAPEL JPS.....	42
BAB III FUNGSI BAPEL JPS SEBAGAI INSTITUSI PERLINDUNGAN SOSIAL DI DESA PANGGUNGHARJO	43
A. Sebagai Fasilitator Untuk Distribusi Pelayanan Terhadap Kaum Miskin Di Desa Panggungharjo	43
B. Reformasi Pola Relasi Antara Pemerintah dan Masyarakat	47
C. Jaringan Pengaman Sosial Terakhir	49
D. Melindungi Masyarakat Rentan dari Kesewenangan Kebijakan Negara.....	52

E. Penghimpun Sumber Daya Sosial	55
F. Program Kesejahteraan Lansia.....	62
BAB IV KONTRIBUSI BAPEL JPS TERHADAP KESEJAHTERAAN LANSIA	
DITINJAU DARI KERANGKA OECD WELL-BEING.....	65
A. Standar OECD dan Cara Indonesia mencapai Kemitraannya.....	65
B. Implementasi Kebijakan Publik terhadap kelompok lansia di Indonesia.....	69
C. Implementasi Kebijakan Sosial terhadap lansia di Desa Panggungharjo ditinjau dari standar OECD.....	75
D. Tantangan Kelembagaan Bapel JPS Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Bagi Lansia	80
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Rekomendasi.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
CURRICULUM VITAE	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu fase dalam perjalanan hidup manusia adalah masa lanjut usia atau yang bisa disebut sebagai Lansia. Fase ini merupakan periode penutup yang menandai akhir dari masa produktif mereka. Definisi lebih rinci disebutkan dalam Undang-Undang No 13 tahun 1998, bahwa bisa disebut lansia jika seseorang sudah melewati usia 60 tahun.¹ Lansia juga bisa menjadi indikator demografi untuk menentukan struktur penduduk khususnya di Indonesia. Suatu wilayah dapat dikategorikan memiliki struktur penduduk tua apabila jumlah lansianya melebihi presentase 10 persen dari total penduduk. Catatan tahun 2023 menampilkan gambaran bahwa keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia memiliki presentase lansia hingga 6 persen. Daerah-daerah yang memiliki jumlah lansia di atas angka tersebut adalah Bali dan Sulawesi Utara dengan 13 persen, Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan 15 persen, lalu yang paling tinggi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah 16,02 persen.²

Angka-angka di atas mengalami perkembangan di periode 2024 hingga 2025. Lampiran tahun 2024 menunjukkan angka yang menyatakan bahwa sebanyak 21 provinsi sudah memiliki jumlah lansia di atas 10 persen.³ Jumlah ini turun lagi di tahun 2025, dimana hanya 16 provinsi yang memiliki angka tersebut. DI Yogyakarta kembali dengan jumlah angka tertinggi dengan

¹ Fildzah Malahati, "Gambaran Penerimaan Diri Pada Lansia Di Indonesia," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4 (2023): hlm 1055.

² Laporan Jumlah Penduduk Lansia tahun 2023, Badan Pusat Statistik, hlm 18.

³ Laporan Jumlah Penduduk Lansia tahun 2024, Badan Pusat Statistik, hlm 18

presentase 16,28 pada tahun 2024 dan 17,78 pada tahun 2025.⁴ Papua memiliki jumlah presentase paling sedikit dengan 6,69 persen. Persebaran lansia ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dimana di setiap daerah pasti memiliki program yang ditujukan untuk kesejahteraan lansia.

Program kesejahteraan bagi lansia sangat penting mengingat lansia memiliki beberapa problem krusial khususnya kesehatan dan relevansi mereka terhadap perkembangan zaman. Indonesia pada saat ini mengalami sebuah problem yang disebut sebagai *ageing population*. Penduduk semakin bertambah tua maka dari itu juga harus diiringi dengan perbaikan kualitas kesehatan dan harapan hidup lansia.⁵ Masalah kesehatan seperti hipertensi, penyakit saraf dan beberapa penyakit lainnya sering dialami oleh lansia. Fokus masalahnya adalah pada tidak meratanya ekonomi Indonesia sehingga memiliki konsekuensi pada tingkat kesejahteraan lansia juga. Akses terhadap kesehatan dan pelayanan maksimal masih menjadi salah satu fasilitas yang sulit didapat.

Laporan dari Badan Statistik di Periode 2023 hingga 2025 menunjukkan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tua paling banyak di Indonesia. Kenaikan presentasinya bahkan cukup signifikan yaitu mulai 16,02 persen pada 2023 hingga 17,78 persen pada 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa wilayah ini wajib menjadi prioritas dalam implementasi program-program yang berpihak pada lansia. Program-program yang bisa mengakomodasi kebutuhan lansia secara tepat bisa

⁴ Laporan Jumlah Penduduk Lansia tahun 2025, Badan Pusat Statistik, hlm 18

⁵ Berliana Shindy Palupi Et Al., "Hubungan Status Kesehatan Fisik Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta Pendahuluan," *Prosiding STIKES Bethesda Conference* 01, no. 04 (2024): hlm 72.

diklasifikasikan menjadi dua unsur yaitu pemenuhan kebutuhan kesehatan (meliputi gizi, pengobatan, dan perawatan) serta psikologis (meliputi penanganan masalah kesepian dan penyakit mental). Kesepian adalah salah satu masalah yang sering dialami oleh lansia. Mereka tidak lagi produktif serta beberapa teman seumuran sudah tidak bisa berkomunikasi. Maka pemenuhan kebutuhan sosial bisa menjadi krusial.⁶

Program yang sudah dilakukan pemerintah untuk memberi akses lansia terhadap kebutuhan sosial ada beberapa bentuk. Pertama Posyandu Lansia, program ini merujuk pada pemberian layanan pemeriksaan kesehatan. Program ini difasilitasi oleh puskesmas setempat.⁷ Pada program ini lansia juga dipenuhi kebutuhan sosialnya karena berinteraksi dengan teman seumurannya di satu lokasi. Kedua Sekolah Lansia, program ini bermanfaat untuk mengasah kognitif lansia agar tidak terserang demensia. Demensia pada lansia disebabkan karena perasaan kesepian yang dirasakan lansia. Lansia banyak terisolasi dari lingkungan sosialnya karena mereka yang seumuran sudah meninggal atau karena berkurangnya aktivitas produktif yang biasa mereka jalani.⁸

Salah satu Desa di Yogyakarta yang memiliki program unik terkait lansia adalah di Desa Panggungharjo. Lansia di Desa Panggungharjo juga berfungsi sebagai penjaga warisan pengetahuan lokal. Mereka menjaga dan

⁶ Ramadhan Puatra Saputra and Nurhakim Yudhi Wibowo, "Pengalaman Kesepian Pada Lansia: Sysstematic Review," *BHAMADA: Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan* 13, no. 1 (2022): hlm 91.

⁷ Darmin Tuwu and La Tarifu, "Implementasi Program Posyandu Lansia Untuk Menjaga," *Jurnal Publicuho* 6, no. 1 (2023): hlm 21.

⁸ Yulia Fitriani and Ditta Febrieta, "Menggapai Bahagia Dan Sejahtera Di Masa Tua : Implementasi Program Sekolah Lansia Untuk Peningkatan Kualitas Hidup," *Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 4 (2024): hlm 932.

menyampaikan kebijakan adat, cerita-cerita tradisional, dan kebudayaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan pengetahuan ini menjadi aset berharga dalam menjaga identitas dan budaya Desa, serta mengajarkan nilai-nilai tradisional kepada generasi muda. Namun, meskipun tetap setia pada tradisi dan budaya mereka, lansia di Desa Panggungharjo juga menghadapi tantangan akibat perubahan sosial dan ekonomi. Perkembangan modern seperti teknologi, pertanian berbasis pasar, dan urbanisasi sebagian Desa telah mempengaruhi cara hidup mereka. Lansia ini harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini sambil tetap menjaga nilai-nilai dan tradisi yang mereka anut.⁹

Desain pemukiman di Desa Panggungharjo mencerminkan gabungan antara aspek tradisional dan modern. Lansia sering tinggal dekat dengan anggota keluarga mereka, yang memungkinkan perawatan antar-generasi yang lebih mudah. Hal ini menciptakan lingkungan di mana pengetahuan dan nilai-nilai dapat terus ditransfer dari lansia ke generasi muda. Akses ke layanan kesehatan dan dukungan sosial menjadi perhatian utama lansia di Desa Panggungharjo. Tantangan terkait aksesibilitas layanan kesehatan dan pemahaman tentang perawatan kesehatan yang tepat bagi lansia menjadi isu penting. Khususnya lansia di Desa Panggungharjo aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan Desa. Mereka terlibat dalam pengambilan keputusan dan proyek-proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di Desa. Hal ini menunjukkan bahwa lansia masih memiliki peran aktif

⁹ Observasi Lapangan oleh peneliti pada tanggal 13 Mei 2023.

dalam menjalankan komunitas mereka.¹⁰

Dinamika sosial lansia di Desa Panggungharjo mencerminkan perpaduan antara tradisi dan modernitas, dengan peran penting dalam menjaga warisan budaya, mempertahankan solidaritas sosial, dan berkontribusi pada pembangunan Desa mereka. Hal ini menunjukkan keunikan dalam bagaimana lansia berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan mereka di Desa Panggungharjo. Fokus penelitian ini adalah pada kondisi kesejahteraan dan perlindungan lansia di wilayah Panggungharjo yang berguna mengidentifikasi masalah yang ada, serta bagaimana progress bisa diimplementasikan.¹¹

Salah satu lembaga yang berperan bagi pelaksanaan program kesejahteraan khususnya bagi para lansia adalah Badan Pelaksanan Jaring Pengaman Sosial(Bapel JPS). Badan ini menjadi salah satu inovasi dari Desa Panggungharjo untuk melaksanakan program perlindungan kesejahteraan tanpa harus bergantung penuh pada pemerintah pusat. Badan ini dibentuk pada tahun 2013. Tujuannya adalah untuk menjadi garis depan layanan publik bagi warga Desa Panggungharjo.¹² Sasaran yang diprioritaskan oleh Bapel JPS adalah warga yang memiliki tingkat keamanan sosial yang rentan seperti kelompok miskin dan para lansia. Kelompok ini memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan publik karena sumber daya ekonomi yang lemah.

Bapel JPS juga menjadi badan yang berperan dalam pembangunan resiliensi bagi warga Desa Panggungharjo. Para lansia yang tidak memiliki

¹⁰ Observasi lapangan oleh peneliti pada 17 Mei 2023.

¹¹ Wawancara dengan Badan Pelaksana JPS Desa Panggungharjo pada 17 Mei 2023.

¹² Shashia Andini Kristianto and Gunardi Lie, "A Juridical Review of Legal Protection for Workers within the Social Security System in Indonesia," *Jurnal Yustisi* 4, no. 40 (2026): hlm 85.

sumber daya karena keterbatasan mereka, bisa mendapatkan perlindungan kesehatan dan ekonomi. Hal ini karena Bapel JPS terus bekerjasama dengan pihak eksternal seperti Rumah Sehat BAZNAS, untuk terus mendistribusikan sumber daya kesehatan dan kesejahteraan bagi para lansia. Salah satunya resiliensi pasca Covid, dimana lansia menjadi yang paling terdampak karena rentannya kesehatan mereka.¹³

Bapel JPS menjadi salah satu Upaya pemerintah Desa Panggungharjo untuk menyelamatkan masyarakatnya dari determinasi kebijakan pemerintah pusat yang tidak terlalu berpihak kepada masyarakat lokal”. Kebanyakan program Kesejahteraan lansia masih sangat textbook dengan metode pusat yang top-down. Maka dari itu penelitian ini mengisi bagaimana program kesejahteraan lansia dilaksanakan dengan sumber daya lokal yang kuat, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap metode pemerintah pusat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Bapel JPS menjalankan fungsi perlindungan sosial bagi lansia di Desa Panggungharjo?
2. Bagaimana kontribusi Bapel JPS terhadap kesejahteraan masa depan lansia di Desa Panggungharjo ditinjau dari OECD?
3. Apa saja tantangan kelembagaan Bapel JPS dalam penyelenggaraan

¹³ Hendra Try Ardianto, Rina Martini, and Yoga Putra Prameswari, “Membangun Resiliensi Warga: Inisiatif Pemerintah Desa Menciptakan Jaring Pengaman Sosial Menghadapi Pandemi Covid-19,” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 13, no. 2 (2022): hlm 45.

perlindungan sosial bagi lansia?

C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

1. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
 - a. Melihat bagaimana Bapel JPS menjalankan fungsi perlindungan bagi para lansia di Desa Panggungharjo
 - b. Melihat bagaimana kontribusi Bapel JPS bagi kesejahteraan Lansia ditinjau dari framework OECD Well-Being
 - c. Mengetahui apa saja tantangan kelembagaan yang dialami oleh Bapel JPS dalam menyelenggarakan program perlindungan sosial bagi lansia.
2. Signifikasi Penelitian
 - a. Dari segi teoretis dapat menjadi karya ilmiah yang mampu memperkaya wawasan mengenai implementasi program Bapel JPS dan dampaknya terhadap kesejahteraan berikut program penanganannya dalam membina lansia.
 - b. Secara praktis dapat memberikan masukan bagi semua kalangan atau pembaca luas yang orang tuanya termasuk dalam ranah lansia sehingga lebih memahami program khusus yang ditawarkan dalam rangka membina lansia di Indonesia.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah, swasta maupun akademisi dalam ranah perbaikan program perlindungan sosial lansia yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, yaitu berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar lansia.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai implementasi program Bapel JPS dan dampaknya terhadap kesejahteraan dan kebutuhan perawatan lansia sehingga rekomendasi aksi dapat diberikan bagi organisasi masyarakat sipil yang selama ini bergerak di isu lansia.

D. Kajian Pustaka

Lansia merupakan sebutan untuk fase kehidupan manusia yang telah melewati usia 60 tahun keatas. Kondisi di usia ini membuat lansia memiliki atribut fisik yang tidak sekuat mereka yang memiliki usia produktif. Mereka masuk kategori kelompok rentan, karena pada fakta lapangannya banyak dari mereka yang bisa menjadi korban penelantaran dan eksploitasi, maka dari itu dibutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap lansia termaktub dalam UU no 13 tahun 1998. Pasal lain yang juga bisa digunakan sebagai acuan untuk perlindungan terhadap lansia adalah UU No.36 tentang kesehatan dan UU No. 8 tahun 1999. Peraturan ini dibahas oleh Yulias Suci Wulandari dalam jurnalnya yang diterbitkan Universitas Muhammadiyah Riau. Alasan mengapa lansia bisa juga dilindungi dengan hukum ini adalah karena mereka menjadi konsumen paling membutuhkan terhadap jasa pelayanan kesehatan.¹⁴ Perlindungan yang bisa didapatkan oleh lansia ada dua macam, yaitu preventif dan represif.

¹⁴ Yulias Suci Wulandari and Ukas, "Perlindungan Hukum Bagi Pelayanan Pasien Lansia Sebagai Pengguna Jasa Layanan Kesehatan Di Puskesmas Kota Batam," *Journal Equitable* 10, no. 1 (2025): hlm 170.

Perlindungan represif memungkinkan untuk mencegah kondisi paling buruk yang dialami lansia khususnya dalam hal kesehatan, sedangkan perlindungan represif memungkinkan lansia mendapatkan proteksi setelah terjadinya kekerasan atau sengketa. Lansia bisa sangat terlindungi oleh proteksi konsumen, semisal mereka mengalami tindak kekerasan(abuse).

Perlindungan terhadap lansia selain dari UU tentang kesehatan juga bisa dilakukan melalui sandaran hukum UU nomor 13 tahun 2003 yang sekarang mengalami evolusi menjadi UU Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022. Muhammad Farudin dalam jurnalnya menulis tentang bagaimana fakta lapangan bahwa lansia masih menjadi korban eksploitasi tenaga kerja seperti kasus mandi lumpur. Kasus ini menggambarkan bahwa lansia dipaksa untuk bekerja sebagai “pengemis online” yang memeras rasa kasihan dari penonton daring.¹⁵ Fenomena ini dapat menjadi gambaran bahwa lansia masih sangat butuh perlindungan dari berbagai macam aspek. Salah satu aspek yang bisa memperkuat perlindungan terhadap lansia selain hukum positif adalah dengan hukum agama(dogmatis). Wahyuni dkk dalam jurnalnya menyebutkan bahwa lansia secara term ditinjau dari surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an merujuk pada manusia yang sudah pada fase lemah fisik dan psikisnya, secara biologis juga tidak produktif lagi dikarenakan kondisi kesehatannya.¹⁶ Maka dari itu salah satu perintah yang dikeluarkan hukum agama adalah menghormati

¹⁵ Muhamad Farudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Lanjut Usia Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan (Kasus Pengemis Online Dalam Konten Mandi Lumpur Di Tiktok),” *Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): hlm 182.

¹⁶ Wahyuni, Fadhliah Mubakkirah, and Andi Husnuli Khatimah, “Perspektif Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dan Lanjut Usia,” *Comparativa* 6, no. 1 (2025): hlm 86.

orang tua yang mana sifat-sifatnya mencakup perawatan dan pelayanan. Agama khususnya Islam memberi arahan untuk berbakti kepada orang tua sebagai upaya melindungi lansia agar ia mendapatkan perlindungan secara intens khususnya dari anak sendiri. Islam juga mengajarkan bagaimana lansia dan anak-anak adalah prioritas untuk dilindungi ketika kondisi genting seperti peperangan.

Bangunan hukum terhadap perlindungan lansia di Indonesia ternyata belum diatur secara spesifik dan hanya mengacu pada perundang-undangan hukum seperti KUHP. Aturan yang masih umum seperti contoh ketika terjadi kasus kejahatan, belum ada yang secara spesifik berpihak pada kerugian korban, bisa saja malah menguntungkan pelaku. Kasus ini diangkat oleh jurnal yang ditulis oleh Lucy Aresti dari Universitas Jenderal Sudirman. Tulisannya mengkomparasikan tentang bagaimana hukum perlindungan lansia yang ada di Indonesia dengan di Australia.¹⁷ Hukum di Australia secara spesifik sudah mengatur bagaimana ketika lansia khususnya mendapat tindakan kejahatan, maka akan langsung ditetapkan sebagai pelanggaran berat. Hukum ini diatur dalam the Crimes Act 1900, spesifikasinya bahkan juga diatur dalam *Intervention Order Act*, *Carer's Act*, *the Domestic and Family Violence Protection Act 2012 (Old)*, *The South Australian Intervention Orders Act*, *Criminal Law Consolidation Act 1935*, *regulation older People' Financial Arrangements*. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum perlindungan terhadap lansia di Australia tertata dengan sangat rapi dan spesifik, sehingga kesejahteraan disana bisa dirasakan secara signifikan.

¹⁷ Lucy Ariesty, "Analisis Perbandingan Hukum Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Lanjut Usia Di Indonesia Dan Australia," *Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023): hlm 53.

Implementasi perlindungan hukum terhadap lansia dilaksanakan satu paket dengan program-programnya. Salah satu program yang dilaksanakan untuk menjamin kesejahteraan lansia dilakukan oleh UPTD Pesanggrahan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Program yang diusung oleh UPTD ini ditujukan langsung kepada lansia yang berstatus PMKS (penyanggah masalah kesejahteraan sosial).¹⁸ Bentuk dari program ini adalah dengan pemberian bantuan sosial dengan jenis pelayanan dan rehabilitasi. Konklusi dari program adalah kegiatan sudah berjalan dengan sangat baik, namun masih banyak kendala salah satunya komunikasi. Lansia dengan status PMKS lebih sulit untuk diajak berkomunikasi.

Program lain yang digunakan untuk melaksanakan perlindungan terhadap lansia adalah dengan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU). Daerah Sriwedari Kabupaten Pesawaran memiliki program pelayanan khususnya di bidang kesehatan.¹⁹ Para lansia merasa sangat terbantu dengan adanya POSYANDU karena program tersebut membuat mereka lebih mudah mengakses layanan cek kesehatan dan juga gratis. Program di pesawaran ini berjalan cukup baik, akan tetapi memiliki kendala dalam masalah pembiayaan. Salah satu yang menjadi sorotan dalam program POSYANDU adalah tentang penyakit hipertensi. Alasan penyakit ini menjadi sorotan adalah karena menjadi pintu pembuka dari penyakit kronis seperti seranangan jantung, stroke, hingga

¹⁸ Sheryn Wijayanti and Indah Prabawati, "Implementasi Program Kesejahteraan Lansia Di Uptd Pesanggrahan Pmks Mojopahit Kabupaten Mojokerto," *UNESA* 4, no. 2 (2023): hlm 36.

¹⁹ Dina Khunaini, Rosidah, and Hinfia Mosshananza, "Implementasi Program Posyandu Lanjut Usia (Lansia) Di Desa Sriwedari Kecamatan Tegineng Kabupaten Pesawaran," *Jurist: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik* 2, no. 1 (2025): hlm 23.

gagal ginjal. Adanya POSYANDU menjadi sarana atau fasilitator bagi penyuluhan dan pencegahan penyakit ini pada lansia. Program ini sudah dilaksanakan di Panti Wreda di Yogyakarta. Implementasi program POSYANDU untuk lansia tidak terbatas pada bantuan sosial dan kesehatan, akan tetapi juga menjangkau bantuan secara ekonomi. Salah satu contohnya adalah dengan mengadakan arisan rutin bagi lansia, kegiatan ekonomi produktif, hingga pelatihan ketrampilan.²⁰ Fungsi lain dari program bantuan ekonomi adalah untuk menjaga pemasukan bagi lansia di usianya yang tidak lagi produktif.

Para lansia sudah memasuki fase akhir dari hidupnya. Maka dari itu salah satu yang dibutuhkan adalah adanya perawatan secara sepiritual khususnya konteks di Indonesia. Negara dengan basis masyarakat religius tentunya memanfaatkan platform ini untuk membangun program-program lansia. Merujuk bagaimana hukum islam juga mengatur tentang pelayanan dan perawatan terhadap lansia. Maka beberapa program juga kompatibel dengan landasan ini. lembaga yang melaksanakan program ini salah satunya adalah Oemah Singgah Al-Irsyad.²¹ Fokus program-program yang diberikan adalah pembinaan spiritual melalui ceramah dan juga kajian islami. Tujuan dari program yang dilakukan oleh Oemah Singgah ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri bagi lansia, memperbaiki hubungan interpersonal mereka, serta partisipasi mereka dalam kegiatan sosial baik di masyarakat umum maupun

²⁰ Desi Noviani and Rahmi Windhy Astari, "Penyuluhan Dan Edukasi Penyakit Hipertensi Pada Posyandu Lansia Semi Wreda Yogyakarta," *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 12 (2023): hlm 7130.

²¹ Nelly Hasanah et al., "Menguatkan Kemandirian Janda Lansia Dhuafa: Studi Pemberdayaan Di Oemah Singgah Al-Irsyad Cirebon," *L-Ukhwah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 1 (2025): hlm 83.

komunitas.

Penyuluhan terhadap lansia dengan basis agama tidak hanya dilakukan oleh kelompok organisasi muslim. Sarana ini juga dilakukan oleh kelompok agama Kristen seperti yang terimplementasi di Desa Sipahutar. Mayoritas yang menghuni di Desa ini adalah penganut agama kristen, jadi salah satu landasan hukum dogmatis yang kompatibel untuk program penyuluhannya adalah yang berasal dari agama mereka. Para pastor di daerah ini melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk memberikan pelayanan rohani bagi lansia.²² Penyuluhan juga dilakukan dengan pembacaan Al-Kitab secara kolektif dalam suatu forum. Pembacaan kitab kolektif ini memiliki tujuan sosial lebih luas, yaitu agar para lansia bisa berkumpul dan berinteraksi dengan sesama lansia.

Semua program lansia yang dilaksanakan melalui berbagai landasan dan platform memerlukan pendanaan yang bagus agar program bisa berjalan dengan lancar. Salah satu program penunjang pendanaan bagi program seperti POSYANDU, penyuluhan spritual, serta pelayanan kesehatan adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS). Melalui program pembiyaan subsidi ini lansia yang rentan secara ekonomi dapat menikmati fasilitas layanan kesehatan.²³ Program ini juga memungkinkan untuk menjangkau kalangan lansia secara luas dari berbagai macam golongan dan strata sosial.

Lansia secara prioritas harus mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

²² Arya Antoni Banurea et al., "Implementasi Metode Bimbingan Penyuluhan Agama Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Spiritual Lansia Di Desa Sipahutar," *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2026): hlm 1396.

²³ Moh Sholahuddin et al., "Pendampingan Lansia Dan Perbaikan Data Desa (Pelas Pedas) Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka* 3, no. 4 (2025): hlm 668.

Landasan hukum yang jelas dapat menjadi acuan agar program-program yang baru dan lebih berpihak kepada lansia segera dapat dimunculkan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa program-program yang berfokus pada pelayanan lansia masih banyak terkendala oleh regulasi baik secara izin maupun pendanaan. Telaah pustaka yang penulis susun menempatkan posisi penulis sebagai pendukung bagi tulisan-tulisan terdahulu. Hal ini mengacu terkait bagaimana program untuk lansia masih belum bisa terimplementasikan secara maksimal.

Melalui deskripsi penelitian terdahulu diatas. Banyak diketahui bahwa pelaksanaan program kesejahteraan lansia masih sangat top-down sifatnya. Banyak yang dilakukan secara dogmatis dan hukum. Yang perlu diketahui adalah program dari pusat sifatnya belum bisa menyentuh secara langsung kepada lansia. Mereka masih sangat prosedural sehingga sulit menjangkau daerah-daerah. Kelemahan penelitian sebelumnya adalah tidak adanya penjelasan terkait program pelayanan lansia yang langsung dikelola oleh lembaga independen lokal sehingga bisa sangat tepat sasaran. Posisi penelitian ini adalah melengkapi penelitian sebelumnya, yaitu untuk mengeksplorasi lembaga lokal yang bisa secara langsung menyentuh lansia tanpa harus terdeterminasi prosedural kaku dari pemerintah pusat.

E. Kerangka Teori

1. Indikator Kesejahteraan Lansia dalam Measuring Well-Being The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

Kesejahteraan saat ini masih terpaku pada angkaisme yang dideterminasi tingkat GDP yang diterima. Beberapa indikator kesejahteraan masih dipenuhi dengan bagaimana tingkat kemiskinan bisa diturunkan atau tingkat pendapatan bisa dinaikkan.²⁴ Beberapa rekomendasi OECD untuk mendapatkan acuan tingkat kesejahteraan yang genuine adalah dengan beberapa indikator diantaranya status kesehatan, pendidikan dan Keahlian, dan Koneksi Sosial.²⁵

a. Status Kesehatan

Kesehatan masyarakat merupakan aspek penting dalam melihat kesejahteraan masyarakat. Kondisi kesehatan akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan bersosialisasi dengan orang lain. Parameter yang digunakan dalam survei ini adalah angka harapan hidup dan pertanyaan tentang keadaan kesehatan secara umum pada saat survei.

b. Pendidikan dan Keahlian

Pendidikan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan seseorang karena orang-orang dengan pendidikan yang lebih tinggi mempunyai peluang yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang lebih tinggi. Survei ini akan melihat tingkat pendidikan lansia dalam rumah tangga. Selain itu, survei ini juga akan melihat pelatihan yang pernah

²⁴ Annegeke Jansen et al., "Review Beyond GDP : A Review and Conceptual Framework for Measuring Sustainable and Inclusive Wellbeing," *The Lancet Planetary Health* 8, no. 9 (2024): hlm 705, [http://dx.doi.org/10.1016/S2542-5196\(24\)00147-5](http://dx.doi.org/10.1016/S2542-5196(24)00147-5).

²⁵ Lenggo Arya Putri and Lahvem Alginda, "Rekomendasi OECD Untuk Sistem Perlindungan Sosial Indonesia : Analisis Hukum , Ekonomi , Dan Tantangan Implementasi Kebijakan," *Jamsostek* 4 (2026): 54–75.

diterima oleh lansia.

c. Koneksi Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari sehingga frekuensi pertemuan dan kualitas pertemuan dengan orang lain menjadi faktor yang krusial dalam mendapatkan kesejahteraan.

Berdasarkan data dari negara OECD, Lansia dilaporkan tidak memiliki kontak dengan orang lain, tiga kali lebih besar, dibandingkan dengan populasi lain pada umumnya. Parameter yang digunakan untuk mengukur koneksi sosial lansia adalah keaktifan lansia dalam kelompok komunitas dan seberapa sering lansia berinteraksi dengan orang lain.

d. Keterlibatan Publik

Partisipasi dalam politik merupakan kebebasan dan hak bagi setiap individu. Partisipasi dalam komunitas dapat membangun rasa memiliki dan kepercayaan antar sesama. Selain itu, keikutsertaan masyarakat dalam politik dapat memengaruhi kebijakan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Survei akan melihat keterlibatan lansia dalam pemilihan pemimpin dan wakil pemimpin serta keterlibatan lansia dalam musyawarah yang diadakan di dusun/Desa masing-masing.

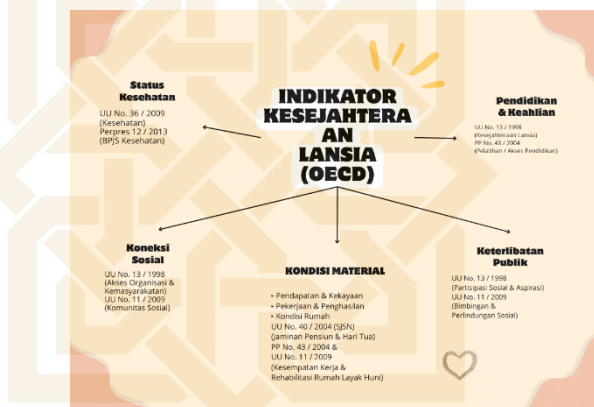
e. Kondisi Material, dalam indikator ini terdapat 3 dimensi, yaitu pendapatan dan kekayaan, pekerjaan dan penghasilan, dan kondisi rumah.

1) Pendapatan dan Kekayaan

Kesejahteraan lansia dapat dianalisis melalui pendapatan dan kekayaan yang mereka miliki. Pendapatan mencakup aliran sumber

ekonomi yang diterima oleh rumah tangga atau individu dalam jangka waktu tertentu, seperti gaji, pendapatan dari usaha sendiri, properti, dana pensiun, dan bantuan sosial. Analisis terhadap pendapatan lansia juga dapat mengungkap akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesenjangan antar rumah tangga ²⁶.

Gambar1.1: Peta Konsep Kesejahteraan Lansia



Selain itu, menghubungkan pendapatan dengan kesenjangan antargender dapat memberikan pemahaman tentang sejauh mana perbedaan gender memengaruhi pekerjaan, pendapatan, dan kepemilikan aset lansia. Dengan demikian, kesejahteraan lansia tidak hanya dinilai dari segi keuangan, tetapi juga dalam pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan gender.

2) Pekerjaan dan Penghasilan

Banyak orang menganggap bahwa lansia akan berhenti bekerja dan menikmati masa pensiun. Namun, dalam konteks Indonesia, belum

²⁶ Nguyen Nguyen, "Investigating the Determinants of Household Welfare in the Central Highland, Vietnam."

ada batasan usia pensiun yang jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Usia pensiun dapat ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Salah satu peraturan yang mengatur usia pensiun adalah Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2015 yang terkait dengan Program Jaminan Pensiun dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Menurut peraturan ini, usia pensiun awal ditetapkan pada 56 tahun, namun mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan akan terus bertambah 1 tahun setiap 3 tahun, hingga mencapai usia pensiun 65 tahun.

Namun, dalam kenyataannya, menjadi lansia tidak selalu berarti pensiun. Banyak faktor yang mendorong lansia untuk tetap bekerja, seperti perjanjian kerja, kebutuhan ekonomi, atau keinginan untuk mengaktualisasikan diri. OECD menekankan bahwa akses dan partisipasi lansia dalam dunia kerja memiliki dampak pada kesehatan fisik dan mental mereka.

3) Kondisi Rumah

Rumah merupakan elemen penting dalam standar kehidupan material masyarakat. Selain sebagai tempat berlindung, rumah juga memberikan rasa keamanan dan ruang pribadi. Kondisi rumah memiliki pengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental, sehingga menjadi faktor yang memengaruhi kesejahteraan rumah tangga.

Untuk mengukur kondisi rumah, beberapa parameter yang

digunakan meliputi bahan atap, dinding, dan lantai rumah. Melalui analisis kondisi rumah lansia, dapat diketahui bagaimana interaksi lansia dengan anggota keluarga, siapa yang memberikan perawatan, bagaimana alokasi sumber daya dalam rumah tangga, serta sejauh mana hak-hak dan preferensi lansia dipenuhi dalam lingkungan keluarga.²⁷

Penelitian ini memiliki relevansi kuat dengan menggunakan kerangka teori OECD untuk mengukur kesejahteraan lansia. Dengan menggunakan kerangka teori ini, penelitian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan lansia di Desa Panggungharjo, termasuk kesehatan, pendidikan, koneksi sosial, keterlibatan publik, pendapatan, pekerjaan, dan kondisi rumah. Dengan pemilihan indikator yang terukur dan pemahaman yang komprehensif, penelitian ini juga akan memberikan analisis yang lebih terstruktur dan menyeluruh tentang kondisi kesejahteraan lansia dalam konteks yang lebih relevan terkait kesejahteraan lansia di Desa Panggungharjo.

2. Undang-undang Kesejahteraan Sosial dan Strategi Nasional Kelanjutusiaan

Sebagai payung hukum dan landasan teori terkait bagaimana kesejahteraan sosial khususnya bagi lansia diimplementasikan di Indonesia. Payung hukum menjadi formulasi teori yang akan menjadi parameter sejauh mana maniferstasi pelaksanaan undang-undang lansia dilaksanakan oleh Bapel JPS. Serta mengukur bagaimana peran riil mereka dalam melakukan

²⁷ Beatriz Herrera, Sabillón Maria, and Bentaya Andrea Knierim, "Measuring Farmers ' Well- - Being : Influence of Farm- - Level Factors on Satisfaction with Work and Quality of Life," *Journal of Agricutrural Economics* 2, no. March 2021 (2022): hlm 453.

pembaruan-pembaruan khususnya di bidang pelayanan publik. Strategi nasional kelanjutusiaan ditambahkan sebagai instrumen untuk mendukung sejauh mana masa depan lansia di Indonesia, apakah mampu sampai pada kemitraan OECD atau akan stagnan pada negara berkembang seperti sekarang ini.

a. Undang-Undang Kesejahteraan Nasional

1) Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Kerangka hukum yang mengatur kesejahteraan nasional—khususnya dalam ruang lingkup perlindungan lanjut usia, jaminan sosial, dan layanan kesehatan—terjalin erat melalui sederet regulasi penting yang saling melengkapi. Landasan ini diawali oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, yang hadir sebagai pemantik utama dalam menegaskan hak-hak fundamental, bentuk perlindungan, serta upaya pemenuhan kebutuhan hidup bagi para lanjut usia agar tetap berdaya dan sejahtera. Pelaksanaan dari undang-undang tersebut kemudian diperjelas secara teknis melalui Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, yang menguraikan langkah-langkah konkret serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan lansia yang nyata di lapangan.

Seiring berkembangnya kebutuhan perlindungan masyarakat, pemerintah membangun fondasi jaminan yang lebih luas dan sistematis lewat Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Regulasi ini merancang payung perlindungan

sosial yang terintegrasi bagi seluruh warga negara untuk mengantisipasi berbagai risiko sosial-ekonomi sepanjang hayat. Semangat perlindungan menyeluruh tersebut diperkuat kembali melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang memperluas jangkauan penyelenggaraan penanganan kerentanan sosial dan kemiskinan secara terarah, inklusif, dan berkelanjutan.

Sektor kesehatan yang menjadi pilar vital kesejahteraan nasional pun ditopang secara kokoh oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan medis yang aman, bermutu, dan terjangkau. Akhirnya, agar pemenuhan hak kesehatan tersebut dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala finansial, dihidirkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 mengenai Jaminan Kesehatan sebagai instrumen operasionalisasi jaminan kesehatan nasional yang tangguh.

2) Usulan DPD untuk perbaikan kesejahteraan lansia

Pemerintah Daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah atau DPD memberikan beberapa usulan yang bisa dijadikan sebagai penguat payung hukum kelansiaan. Usulan tersebut terlampir sebagai berikut:

- a) batasan usia standar lansia harus dinaikkan sesuai standar WHO yaitu yang awalnya 80 tahun menjadi 65 tahun. Penyesuaian standar WHO ini juga harus dibarengi dengan pengelompokan prioritas, yang mana lansia paling memiliki keterbatasan akses dan mobilitas

harus diprioritaskan.

- b) panti yang menampung lansia baik milik dinas sosial maupun milik swasta harus melewati uji standarisasi. Standarisasi ini diawasi mulai dari proses pembangunan, mekanisme pelayanan, sarana-dan prasarana, serta sumber daya manusia yang mengorganisasikan. Uji standarisasi ini akan membawa pada indikator kesejahteraan lansia yang lebih baik.
- c) peningkatan proteksi bagi lansia. Tafsir mengenai bantuan perlindungan sosial terhadap lansia masih terbatas pada bantuan sosial saja. Padahal secara kebutuhan harus ada klasifikasi yang jelas antara jaminan dengan bantuan sosial. Jaminan sifatnya proteksi, bantuan sifatnya ekonomi.
- d) pemberdayaan terhadap lansia harus ditingkatkan. Lansia tidak lagi dianggap sebagai masyarakat produktif, akan tetapi bukan berarti mereka tidak memiliki potensi. Lansia masih memiliki potensi keterampilan yang diakumulasikan dari pengalaman mereka selama hidup, apalagi lansia yang masih memiliki kondisi fisik yang bagus. Peningkatan pemberdayaan terhadap lansia harus dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif.
- e) pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak mungkin bisa menjangkau lansia secara partikular hingga ke Desa-desa. Mereka butuh pembagian wewenang khusus dengan pemerintah daerah

untuk program kesejahteraan lansia. Pemerintah daerah perlu ditegaskan untuk mengalokasikan secara khusus dana untuk para lansia. Supaya kekhawatiran terhadap kesejahteraan lansia di daerah 3 T bisa dikurangi.

- f) lansia perlu memperoleh penghargaan atas hidup mereka. hal ini berkaitan dengan masalah eksistensial mereka dalam dimensi sosial. Proses ini bisa dilakukan dengan ikut mensejahterakan keluarga yang merawat lansia.
- g) urusan kesejahteraan lansia juga harus melibatkan masyarakat secara kolektif. Lansia bukan lagi urusan privat akan tetapi dikonversi menjadi urusan publik. Partisipasi publik akan membaerikan jaminan proteksi bagi lansia secara meluas tidak hanya pada lingkungan keluarga.²⁸
- h) lansia rentan mengalami tindak kriminal oleh oknum tidak bertanggung jawab. Maka dari itu perlindungan terhadap lansia dari gangguan kriminalitas dan tindak kekerasan. Banyak contoh di kehidupan nyata lansia menjadi korban tindak pidana kriminal.

b. Strategi Nasional Kelanjutusiaan

²⁸ inayah Alawiyyah Et Al., “Indikator Kesejahteraan Lansia Dan Pelayanan Yangdapat Diberikan Oleh Pekerja Sosial,” *Kesejahteraan Sosial* 3, no. 1 (2025): hlm 34.

Gambar 1.1: indikator tingkat kesejahteraan lansia

Visi	Domain	Indikator	Sumber data	Baseline	2024
Mandiri	Jaminan Pendapatan	Tingkat kemiskinan lanjut usia (%)	Susenas	12,8	<5
	Mobilitas dan kapabilitas	Lanjut usia yang tidak mengalami kesulitan dalam berjalan/naik tangga dan/ atau menggerakkan/menggunakan tangan dan jari (%)	Supas	92,1	95
		Lanjut usia yang tidak mengalami kesulitan dalam melihat, mendengar, berbicara/berkomunikasi, mengingat/konsentrasi, dan/ atau mengurus diri (%)	Supas	88,6	90
Sejahtera	Tingkat kesehatan	Usia harapan hidup (0)	BPS	71	74
		Usia harapan hidup sehat (0)	BPS	62	68
	Pekerjaan yang baik	Penduduk lanjut usia yang bekerja formal (%)	Sakernas	15,35	50
		Kawasan ramah Lansia (kabupaten/Kota/Komunitas)	Susenas	NA	Meningkat
	Pekerjaan yang baik	Penduduk lanjut usia yang bekerja formal (%)	Sakernas	15,35	50
		Kawasan ramah Lansia (kabupaten/Kota/Komunitas)	Susenas	NA	Meningkat
Bermartabat	Kondisi kejiwaan	Lansia aktif mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (%)	Susenas	NA	Meningkat
	Lingkungan yang mendukung	Lanjut usia yang tidak mengalami kekerasan/kejahatan	Susenas	98,67	100
	Kondisi spiritual	Rumah tangga dengan lanjut usia yang aktif pada kegiatan keagamaan	Susenas	NA	Meningkat

Berdasarkan indikator diatas maka tingkat kesejahteraan lansia harus terus ditingkatkan. Persiapan terhadap masyarakat yang mengalami penuaan harus dipersiapkan sedini mungkin. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem kelembagaan yang kuat bagi penanganan kesejahteraan lansia. Persiapan yang dilakukan juga terkait bagaimana skema kesehatan individu dan mempersiapkan active ageing. Strategi nasional atau stranas berisi konsep:

- 1) Pembagunan masyarakat dan Sumber Daya manusia terkait kelanjutusiaan
- 2) Penguatan institusi pelaksana kelanjuusiaan
- 3) Peningkatan perlindungan sosial
- 4) Jaminan pendapatan dan kapasitas individu
- 5) Peningkatan kualitas kesehatan lanjut usia
- 6) Perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap lansia.

Gambar 1.2: Presentase Nasional Jumlah Lansia di Indonesia

Provinsi	Periode				
	2000-2005	2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025
DKI Jakarta	73,0	74,0	74,7	75,4	75,8
Banten	64,6	67,3	69,4	70,9	71,9
Jawa Timur	67,8	70,0	71,9	73,2	73,9
Sulawesi Barat	66,3	68,7	70,7	72,0	72,8

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data alamiah yang bertujuan untuk mengeksplor fenomena yang ada ²⁹. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dan mendeskripsikan kondisi kesejahteraan lansia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Desa Panggungharjo. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan persepsi lansia secara mendalam, serta memahami konteks sosial, budaya, dan lingkungan tempat tinggal mereka.

²⁹ Anggito and Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

2. Penentuan sumber data.

a. Sumber data primer:

Sumber data primer dalam penelitian ini akan diperoleh langsung dari lansia yang tinggal di Desa Panggungharjo. Data primer akan dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan keterlibatan peneliti dalam kegiatan sehari-hari lansia. Melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, data primer akan memberikan informasi yang kaya dan mendalam tentang implementasi program BAPEL JPS serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan dan perlindungan lansia di Desa Panggungharjo.

Tabel 1.1: Narasumber-narasumber wawancara

Narasumber	Jumlah	Jabatan
Pak Lurah	1	Lurah
Pegawai Bapel JPS	1	Pelaksana
Pegawai Bapel JPS	1	Pelaksana
Mbah MK	1	Lansia
Mbah RJ	1	Lansia
Mbah P	1	Lansia
Mbah K	1	Lansia
Mbah Y	1	Lansia
Mbah JH	1	Lansia
Mbah W	1	Lansia

Subyek penelitian ini yaitu: para pengampu kepentingan antara lain yaitu, para lansia, kepala Desa/lurah, dukuh, perangkat Desa, dan tim BAPEL JPS. Subyek Penelitian ini juga termasuk para pengurus BAPEL

JPS dengan kriteria sudah bekerja 1-3 tahun dalam bidangnya dan para perangkat Desa Panggungharjo dengan jumlah 1 informan, 2 pegawai Bapel JPS, serta 7 orang lansia yang menjadi sumber primer. Sedangkan Obyek penelitian ini adalah tentang implementasi program BAPEL JPS dalam perlindungan kesejahteraan lansia di Desa Panggungharjo.

b. Sumber data sekunder:

Sumber data sekunder akan digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung penelitian ini. Data sekunder dapat diperoleh dari dokumentasi, laporan, dan publikasi terkait kesejahteraan lansia di Desa Panggungharjo. Sumber data sekunder ini dapat mencakup data statistik, kebijakan pemerintah, studi sebelumnya, dan literatur terkait. Data sekunder akan digunakan untuk memperluas pemahaman tentang konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan lansia dalam Desa tersebut.

3. Teknik pengumpulan data.

a. Observasi:

Teknik observasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengamati secara langsung kondisi kesejahteraan lansia di Desa Panggungharjo. Observasi dilakukan dengan memperhatikan aktivitas sehari-hari lansia, interaksi dengan lingkungan dan masyarakat, serta kondisi fisik dan psikis mereka. Observasi memberikan pemahaman yang mendalam tentang realitas yang dialami lansia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk mengetahui implementasi program BAPEL JPS serta dampak kebijakan

terhadap kesejahteraan mereka ³⁰.

b. Wawancara:

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dan mendalam dari lansia tentang pengalaman, pandangan, dan persepsi mereka terkait implementasi program BAPEL JPS serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan dan perlindungan lansia. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan kepada perangkat Desa serta pengurus BAPEL JPS dalam membuat kebijakan dan mengimplementasikannya.

c. Dokumentasi:

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dokumen terkait kondisi kesejahteraan lansia di Desa Panggungharjo. Dokumen yang dapat dikumpulkan meliputi data statistik, laporan pemerintah, kebijakan terkait lansia, catatan kegiatan lansia, dan literatur terkait. Data dari dokumen tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang konteks dan permasalahan yang terkait dengan implementasi program BAPEL JPS serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan dan perlindungan lansia di Desa tersebut.³¹

³⁰ Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*.

³¹ Suwendra.

4. Teknik analisis data

a. Reduksi Data:

Setelah data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, langkah pertama dalam analisis data adalah reduksi data. Reduksi data melibatkan pengorganisasian, penyusunan, dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan. Data yang telah direduksi menjadi lebih terfokus dan relevan dengan tujuan penelitian. Teknik reduksi data meliputi pengkodean, kategorisasi, pengelompokan, atau penyusunan tema-tema utama yang muncul dari data.

b. Penyajian Data:

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data secara sistematis dan jelas. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi yang terstruktur. Penyajian data bertujuan untuk memvisualisasikan temuan dan pola yang muncul dari analisis data. Penyajian data yang baik akan mempermudah pemahaman dan interpretasi terhadap hasil penelitian.

c. Kesimpulan atau Verifikasi:

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi terhadap temuan penelitian. Kesimpulan didasarkan pada analisis data yang telah dilakukan dan harus sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan berupa temuan utama, pola-pola yang muncul, atau jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan dengan teori-teori yang relevan atau

melalui diskusi dengan pihak terkait untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian digunakan untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman terhadap isi Tesis. Oleh karena itu sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab 1 pendahuluan, pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hasil tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan.

Bab II gambaran umum mengenai Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta yang terdiri dari kondisi demografis, visi, misi dan tujuan, program pelayanan BAPEL JPS, struktur organisasi, kondisi dan proses pelayanan.

Bab III pembahasan bagaimana Bapel JPS menjalankan fungsi perlindungan bagi para lansia di Desa Panggungharjo.

Bab IV, kontribusi Bapel JPS bagi kesejahteraan Lansia ditinjau dari framework OECD Well-Being, serta mengetahui apa saja tantangan kelembagaan yang dialami oleh Bapel JPS dalam menyelenggarakan program perlindungan sosial bagi lansia.

Bab V, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dari temuan di lapangan dan analisis data yang kemudian memberikan saran-saran yang membangun bagi lembaga, pemerintah, maupun kebijakan yang terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bapel JPS memiliki beberapa fungsi terkait pelaksanaan program kesejahteraan di Desa Panggungharjo khususnya bagi para lansia. Fungsi pertama adalah sebagai pelayan publik di tingkat lokal bagi para warganya. Banyak faktor yang menyebabkan program pemerintah pusat tidak maksimal adalah karena ketimpangan distribusi pelayanan publik. Kedua adalah reformis untuk program pemerintah yang memiliki domain lokal. Manfaat yang dirasakan adalah mereka bisa secara merata mendapat fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi melalui sistem kartu sakti. Ketiga adalah sebagai pelindung masyarakat Desa Panggungharjo dari kesewenang-wenangan pemerintah pusat.

Melalui analisis kesejahteraan Measuring Well-Being dari OECD. Standar kesejahteraan lansia di Indonesia masih sangat jauh dari kata layak. Faktor yang menyebabkan lansia sulit mendapatkan kesejahteraannya adalah karena kebijakan pemerintah pusat yang terlalu kaku dan top-to down, sehingga sulit menjangkau masyarakat lokal secara partikular. Bapel JPS sebagai institusi lokal berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan program kesejahteraan lansia yang tepat sasaran khususnya di daerah Desa Panggungharjo. Bapel JPS berusaha agar lansia bisa mendapatkan fasilitas pelayanan publik yang layak, bantuan sosial yang tepat sasaran, akses terhadap

sumber daya yang merata, serta mobilitas dan produktifitas. Sehingga lansia tidak lagi dianggap secara konstruksi sosial angkaisme pemerintah pusat sebagai entitas tidak produktif.

Pelaksanaan program Bapel JPS masih jauh dari bentuk ideal. Regenerasi yang lambat serta kemandegan inovasi lembaga menjadi kendala yang sampai saat ini dihadapi Bapel JPS. Badan ini mengalami stagnasi selama sepuluh tahun. Para anggota masih merasa sangat nyaman dengan kondisi yang ada.

B. Rekomendasi

Penelitian selanjutnya harus lebih luas dalam mengelaborasi tingkat kesejahteraan lansia di tingkat masyarakat. khusunya bagi masyarakat lokal. Banyak lansia di daerah yang belum mendapatkan akses pelayanan yang baik. Aspek yang harus diperhatikan dalam penelitian selanjutnya adalah bagaimana lansia dilihat sebagai subjek utuh. Bukan indikator angka-angka yang bisa dinaik-turunkan setiap waktu. Kedepannya mungkin bisa dilakukan penelitian lebih mendalam khusunya tentang tingkat kebahagiaan lansia yang lebih genuine.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyyah, Inayah, Yani Achdiani, Gina Indah, And Permata Nastia. “Indikator Kesejahteraan Lansia Dan Pelayanan Yangdapat Diberikan Oleh Pekerja Sosial.” *Kesejahteraan Sosial* 3, No. 1 (2025): 32–37.
- Ardianto, Hendra Try, Rina Martini, And Yoga Putra Prameswari. “Membangun Resiliensi Warga: Inisiatif Pemerintah Desa Menciptakan Jaring Pengaman Sosial Menghadapi Pandemi Covid-19.” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 13, No. 2 (2022): 44–45.
- Ariesty, Lucy. “Analisis Perbandingan Hukum Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Lanjut Usia Di Indonesia Dan Australia.” *Hukum Ius Publicum* 4, No. 2 (2023): 52–64.
- Aulia, Ade Shanti, Azizah Nurul Marissa, Monica Ayu Priscilla, And Raden Dinda. “Analisis Dampak Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Sosial Terhadap Tingkat Korupsi Di Negara Asean-5.” *Integrative Perspective Of Social And Science Journal* 2, No. 3 (2023): 4847–4857.
- Banurea, Arya Antoni, Ayu Roger Sinaga, Marchel Sitio, Neila Fanita, Ronatalia Sibarani, Widia Lumban Gaol, And Melina Agustina Sipahutar. “Implementasi Metode Bimbingan Penyuluhan Agama Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Spiritual Lansia Di Desa Sipahutar.” *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 5, No. 1 (2026): 1395–1403.
- Farudin, Muhamad. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Lanjut Usia Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan (Kasus Pengemis Online Dalam Konten Mandi Lumpur Di Tiktok).” *Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, No. 1 (2025): 181–191.
- Fitriani, Yulia, And Ditta Febrieta. “Menggapai Bahagia Dan Sejahtera Di Masa Tua : Implementasi Program Sekolah Lansia Untuk Peningkatan Kualitas Hidup.” *Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, No. 4 (2024): 931–938.
- Hasanah, Nelly, Diyah Salsabila, Muhammad Naufal Kholid, And Hamzah Malikiy Assegaf. “Menguatkan Kemandirian Janda Lansia Dhuafa: Studi Pemberdayaan Di Oemah Singgah Al-Irsyad Cirebon.” *L-Ukhwah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, No. 1 (2025): 71–83.
- Herrera, Beatriz, Sabillón Maria, And Bentaya Andrea Knierim. “Measuring Farmers ’ Well-Being : Influence Of Farm- Level Factors On Satisfaction With Work And Quality Of Life.” *Journal Of Agricutrtural Economics* 2, No. March 2021 (2022): 452–471.

- Jansen, Annegeke, Ranran Wang, Paul Behrens, And Rutger Hoekstra. "Review Beyond Gdp : A Review And Conceptual Framework For Measuring Sustainable And Inclusive Wellbeing." *The Lancet Planetary Health* 8, No. 9 (2024): 695–705. [Http://Dx.Doi.Org/10.1016/S2542-5196\(24\)00147-5](http://Dx.Doi.Org/10.1016/S2542-5196(24)00147-5).
- Karpunina, Evgeniya K, Larisa V Moskovtceva, Olga V Zabelina, Natalia N Zubareva, And Anna V Tsykora. "Socio-Economic Impact Of The Covid-19 Pandemic On Oecd Countries." Edited By Elena G Popkova And Inna V Andronova. *Current Problems Of The World Economy And International Trade*. Emerald Publishing Limited, March 30, 2022. [Https://Doi.Org/10.1108/S0190-128120220000042011](https://Doi.Org/10.1108/S0190-128120220000042011).
- Khunaini, Dina, Rosidah, And Hinfia Mosshananza. "Implementasi Program Posyandu Lanjut Usia (Lansia) Di Desa Sriwedari Kecamatan Tegineng Kabupaten Pesawaran." *Jurist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik* 2, No. 1 (2025): 22–28.
- Kristianto, Shashia Andini, And Gunardi Lie. "A Juridical Review Of Legal Protection For Workers Within The Social Security System In Indonesia." *Jurnal Yustisi* 4, No. 40 (2026): 84–88.
- Malahati, Fildzah. "Gambaran Penerimaan Diri Pada Lansia Di Indonesia." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2, No. 4 (2023): 1055–1064.
- Novaldo, Gregorius, And Dela Rosari Strada. "Employee Well-Being Programs And Their Impact On Productivity And Competitive Advantage Article History :." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis* 4, No. 3 (2025): 63–75.
- Noviani, Desi, And Rahmi Windhy Astari. "Penyuluhan Dan Edukasi Penyakit Hipertensi Pada Posyandu Lansia Semi Wreda Yogyakarta." *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 12 (2023): 7129–7140.
- Nurazimar, Deyana Firdhausya. "Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Pemberian Pelayanan Sosial Lansia Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Lansia Di Balai Rehabilitasi Sosial Lansia Budhi Darma Bekasi." *Privat Law* 11, No. 1 (2023): 35–47.
- Palupi, Berliana Shindy, Mei Rianita, Elfrida Sinaga, Sekolah Tinggi, Ilmu Kesehatan, And Bethesda Yakkum. "Hubungan Status Kesehatan Fisik Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta Pendahuluan." *Prosiding Stikes Bethesda Conference* 01, No. 04 (2024): 71–85.
- Saputra, Ramadhan Puatra, And Nurhakim Yudhi Wibowo. "Pengalaman Kesenian Pada Lansia: Sysstematic Review." *Bhamada: Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan* 13, No. 1 (2022): 90–99.

Sholahuddin, Moh, Alvira Widyaningsih, Desy Alya, Putri Rahmasari, Cantika Ariyanto, Yusril Nur Rahma, Dinda Nur Kusumawardani, And Darojatul Akbari. "Pendampingan Lansia Dan Perbaikan Data Desa (Pelas Pedas) Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka* 3, No. 4 (2025): 660–668.

Tuwu, Darmin, And La Tarifu. "Implementasi Program Posyandu Lansia Untuk Menjaga." *Jurnal Publicuho* 6, No. 1 (2023): 20–29.

Wahyuni, Fadhliah Mubakkirah, And Andi Husnuli Khatimah. "Perspektif Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dan Lanjut Usia." *Comparativa* 6, No. 1 (2025): 85–110.

Wijayanti, Sheryn, And Indah Prabawati. "Implementasi Program Kesejahteraan Lansia Di Uptd Pesanggrahan Pmks Mojopahit Kabupaten Mojokerto." *Unesa* 4, No. 2 (2023): 35–45.

Wulandari, Yulias Suci, And Ukas. "Perlindungan Hukum Bagi Pelayanan Pasien Lansia Sebagai Pengguna Jasa Layanan Kesehatan Di Puskesmas Kota Batam." *Journal Equitable* 10, No. 1 (2025): 169–185.

